



BAB VIII

GAGASAN-GAGASAN TENTANG DASAR NEGARA INDONESIA

A. HOS. Tjokroaminoto: Pencipta Lambang Dasar Negara

HOS Tjokroaminoto secara terbuka melakukan aksinya pada 1912 ketika ia melebur SDI menjadi Sarekat Dagang Islam (SDI) dan mengubah konsep pergerakan ekonomi menjadi organisasi pergerakan yang berorientasi social-politik. Dengan Sarekat Islam (SI), Tjokroaminoto berusaha menumbuhkan nasionalisme terhadap realitas masyarakat Indonesia.

Kelahiran SI merupakan gerakan Nasional Indonesia dengan semangat keagamaan justru telah memberikan pengaruh terhadap Gerakan Nasional yang lahir kemudian. Pengaruh ini setidaknya dapat dibuktikan dengan dipakainya bagian-bagian lambang SI sebagai gambar dan lambing partai-partai Politik, seperti Partindo dan PNI pada masa gerakan nasional. Bahkan sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara, pengaruh lambang SI terhadap lambang SI “badan banteng” yang merupakan bagian dari lambang SI disederhanakan menjadi “kepala banteng” yang merupakan bagian dari lambang burung garuda. Demikian pula dengan lambang “kapas dan padi” yang merupakan bagian-bagian lain dari lambang SI dipakai pada lambang Perisai Burung Garuda. Karena pengaruh SI terhadap lambang Negara Indonesia inilah, belakangan Ahmad Mansur Suryanegara berpendapat bahwa selain Soekarno yang telah menyatakan diri sebagai penggali Pancasila, maka Tjokroaminoto adalah Tokoh yang tepat dipandang sebagai pencipta Pancasila

B. Dari Pancasila Hingga Eka Sila: Gagasan Pancasila Soekarno

Gagasan Soekarno tentang Pancasila dimulai ketika ia menyampaikan pidato di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato itu Soekarno memberikan landasan kehidupan bagi bangsa Indonesia dengan lima dasar, yaitu:

1) Kebangsaan Indonesia

Bagi Soekarno kebangsaan Indonesia merupakan kebangsaan dalam arti yang sangat luas, yang berarti nasional state. Kebangsaan Indonesia menunjukkan kehendak dan kemauan yang keras dari seluruh bangsa Indonesia tentang persatuan. Internasionalisme atau Perikemanusiaan

2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan

Konsep ini mengandung nilai bahwa sebuah bangsa merupakan bagian dari bangsa-bangsa di dunia. Kedaulatan sebuah bangsa tidak lepas dari pengakuan oleh bangsa-bangsa lain. Karena itu internasionalisme menjadi penting bagi kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia. Pengakuan adanya bangsa-bangsa di seluruh mutlak diperlukan, tetapi semangat persatuan seluruh bangsa tidak boleh diabaikan.

3) Musyawarah atau Demokrasi.

Negara Indonesia bukan milik satu orang, satu golongan, atau satu suku bangsa saja. Bangsa Indonesia milik seluruh rakyat. Perlu prinsip-prinsip mufakat dan musyawarah. Musyawarah ditujukan untuk menciptakan persatuan seluruh rakyat. Mufakat ditujukan untuk mencapai kebersamaan. Satu untuk semua, semua untuk satu.

4) Kesejahteraan Sosial

Prinsip kesejahteraan sosial memberikan keselamatan dan hak-hak warga Negara untuk menikmati kesejahteraan hidup. Kesejahteraan sosial mengutamakan rasa setia kawan, kebersamaan dalam bidang ekonomi, kesetaraan dalam bidang sosial dan persamaan hak sebagai warga Negara.

Rasa kebangsaan yang hidup harus memenuhi keinginan seluruh rakyat dalam. Demikian juga, prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat diupayakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebesarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

5) Ketuhanan yang Maha Esa.

Pandangan Soekarno tentang sila Ketuhanan mengacu kepada sistem kehidupan bangsa Indonesia yang sudah berlangsung sejak nenek moyang bangsa ini berada. Ia menyebut dengan istilah *religieusiteit*, yaitu kepercayaan kepada sesuatu yang gaib, yang sudah ada sejak berpuluh-puluh, beratus-ratus dan beribu-ribu tahun menjadi model kehidupan rakyat Indonesia.

Kelima konsep ini yang kemudian dikenal dengan Pancasila ini, menurut Soekarno digali berdasarkan fenomena kehidupan agraris Indonesia dan ditemukan dalam buku kertagama, dalam perkembangannya, gagasan Soekarno tentang "lima dasar" yang lahir pada 1 Juni 1945 ini, berkembang.

C. Pancasila atau Islam: Gagasan Dasar Negara Mohammad Natsir

Persatuan agama dengan Negara. Pandangan Mohamad Natsir tentang dasar Negara bagi Indonesia lebih terfokus pada kemungkinan dasar Negara Islam. Kecenderungan terhadap Islam sebagai satu-satunya dasar Negara bagi Indonesia ini sesungguhnya sudah tercermin sejak jauh sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya ketika terjadi polemik dengan Soekarno tentang hubungan agama dengan Negara Soekarno memiliki pandangan bahwa Negara dengan agama harus dipisahkan, sementara Natsir berpandangan bahwa agama dengan Negara harus bersatu.

Natsir berpendapat dalam menyusun sebuah pemerintahan, Islam meletakkan dasar-dasarnya secara dinamis. Natsir menunjukkan adanya keselarasan konsep-konsep pemerintahan Islam dengan fenomena kehidupan masyarakat yang terus berkembang, bahkan karena kedinamisannya itu, Islam tidak pernah mengenal kepala Negara sebagai seorang yang diangkat atas nama Tuhan. Itulah sebabnya umat Islam di Indonesia bisa menerima Pancasila sebagai dasar Negara, kendati hal itu dilakukan karena Pancasila memang menjadi satu-satunya alternatif.

Natsir meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya faham yang telah menjadi kekuatan bagi kehidupan dan perjuangan bagian terbesar rakyat Indonesia. Islam adalah faham yang telah menjiwai bangsa Indonesia. Didalam Islam terdapat fungsi memimpin, memberikan bimbingan, memenuhi kebutuhan, dan menyelamatkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Fungsi-fungsi itulah yang diperlukan bagi terselenggaranya pemerintahan Negara. Suatu Negara akan mampu melakukan kewajiban secara maksimal jika telah mempunyai dasar-dasar yang kuat dan mengakar dalam pikiran, perasaan, dan kepercayaan rakyatnya. Oleh karena itu, dengan dasar Negara Islam, suatu Negara akan dengan mudah menyelesaikan persoalan-persoalan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Tetapi usaha Natsir untuk menerapkan Islam sebagai dasar Negara dalam sidang-sidang konstituante memang tidak membawa hasil yang semestinya, setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan dekrit itu, Presiden membubarkan konstituante dan kembali kepada UUD 1945.

D. Pemikiran Pancasila Mohammad Yamin

Dalam Pidatonya, Mohammad Yamin menyampaikan beberapa usulan (lima) untuk dijadikan dasar Negara, yaitu:

- 1) **Peri Ketuhanan.** Ketuhanan sendiri bukanlah dasar, melainkan pengakuan kepada Ketuhanlah yang menjadi dasar Negara. Ketuhanan yang dimaksud adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, Tunggal dan tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip *Monotheisme* (ketuhanan yang satu), bukan *Polytheisme* (kedewaan yang banyak), apalagi *Atheisme* (tidak bertuhan).
- 2) **Peri-Kemanusiaan.** Dasar ini merupakan suatu tinjauan hidup, bahwa manusia seluruh dunia adalah sama-sama makhluk Tuhan. Sikap Ruhani yang demikian mengatasi sikap kebangsaan yang sempit dan mengatasi segala perasaan yang terikat kepada perbatasan bangsa dan Negara.
- 3) **Kerakyat (demokrasi).** Demokrasi, menurut Mohammad Yamin adalah dasar pembentukan pemerintahan dan masyarakat yang didalamnya kekuasaan memerintah atau mengatur dipegang secara sah, tidak hanya oleh satu atau beberapa golongan saja, melainkan oleh segala anggota masyarakat.
- 4) **Kebangsaan Indonesia (Nasionalisme).** Nasionalisme Indonesia yang dinyatakan pada permulaan Konstitusi ini ialah Nasionalisme persatuan (*unitarisme*), bukan Nasionalisme *Federalisme*. Nasionalisme Indonesia juga menghendaki Kemerdekaan yang penuh bagi seluruh daerah dan rakyat Indonesia.
- 5) **Keadilan Sosial.** Keadilan Sosial bertujuan melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh warga Negara. Baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Demokrasi politik member hak yang sama kepada semua warga Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadi pegawai dalam berbagai jawatan dan lembaga maupun dalam bentuk pembelaan terhadap tanah air.